KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Tim Implementasi Reformasi DPR RI Siapkan Enam UU Baru Untuk Perbaiki Sistem Kelembagaan Dewan Perwakilan
Tanggal : Kamis, 18 April 2019
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 7

Tim Implementasi Reformasi DPR RI

Siapkan Enam UU Baru Untuk Perbaiki Sistem Kelembagaan Dewan Perwakilan

Jakrata: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fahri Hamzah mengatakan saat ini Tim Implementasi Reformasi DPR RI sedang menyiapkan enam Undang-Undang (UU) baru untuk memperbaiki sistem kelembagaan dewan perwakilan. Dari enam UU itu, empat adalah pecahan dari UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3). Ia menegaskan, lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, DPD dan DPRD adalah lembaga-lembaga yang besar, sehingga sudah sepatutnya memiliki aturan sendiri.



Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) itu, karena masih tergabungnya empat lembaga perwakilan dalam satu UU, sehingga cara membaca undang-undangnya pun sering tidak *clear*. Makanya sebaiknya dipisahkan, ada UU MPR, UU DPR, UU DPD, dan UU DPRD. Terlebih lagi di internal DPR RI, independensi Anggota Dewan masih sangat terikat dengan partainya.

"Kita mau mengatur keseluruhan konsep independensi lembaga perwakilan, sebab ini yang enggak ada. Harus jujur kita katakan, DPR tidak independen, karena sistem hubungannya dengan partainya sangat tidak independen," papar Fahri Hamzah saat Focus Group Discussion (FGD) Peluncuran buku karya Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.



Menurut Fahri Hamzah, Anggota DPR RI seharusnya setelah terpilih menjadi Anggota Dewan, maka hubungannya dengan partai politik harus menjadi lebih independen, karena ada suara rakyat pada dirinya. Independensi lembaga perwakilan ini akan dituangkan dalam undang-undang lembaga perwakilan, sehingga tidak saja orangnya tapi kawasannya juga independen.

"Betapa pentingnya DPR ke depan di-bikin merdeka, di-bikin lebih independen. Kami mengundang para ilmuwan untuk membicarakan konsep ini. Kita undang pakar-pakar, kita berikan drafnya, kita kasih gambaran frame besarnya. Inilah desain lembaga perwakilan kita yang sesuai dengan undang-undang dasar," papar legislator dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.

Penguatan lembaga DPR RI ini juga pernah disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah saat membuka seminar 'Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern', di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Selasa (4/12/2018). Fahri Hamzah menilai menilai saat ini DPR masih tersandera dengan kekuatan eksekutif yang begitu kuat.

Faktanya kita (DPR) belum terlalu independen. Saya sering mengatakan dalam legislasi, kuasa eksekutif menurut saya di atas 50 persen apalagi eksekutif punya instrumen Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)," kata Fahri. Selain itu, dia mencontohkan dalam hal fungsi anggaran atau bujet. Dia menyebut kuasa DPR atas fungsi anggaran lemah. "Dalam hal bujet itu apa lagi, apa yg terjadi kalau kita bilang fungsi budgeting di DPR lah ini lemah sekali, sedang proposalnya dari pemerintah begitu datang proposal itu fix," tandas Farhri Hamzah sembari memberikan usulan untuk menjadikan DPR sebagai lembaga perwakilan yang independen.

DPR RI mengundang anggota parlemen negara-negara sahabat untuk menyaksikan langsung proses Pemilihan Umum (Pemilu) serentak di Tanah Air. Ini bagian dari upaya DPR RI dalam memperlihatkan Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Apalagi pada Pemilu kali ini menghadirkan sekaligus Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg).

Inisiatif DPR RI

Sementara itu dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Election Visit Indonesia 2019, DPR RI mengundang parlemen berbagai negara diantaranya Turki, Malaysia, Pakistan, Rusia, dan dua organisasi internasional seperti Organisasi Konferensi Islam dan Westminster Foudation for Democracy (WFD), Inggris, dan kegiatan ini bagian dari upaya untuk melihat bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Ini adalah inisiatif DPR untuk mengundang sejumlah anggota parlemen dari beberapa negara sahabat sekaligus organisasi internasional yang selama ini dekat dan bekerja sama dengan DPR. Ini adalah Pemilu serentak pertama," pungkas Fahri.

[*/info]